

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Nurul Ariska¹, Ahmad Yasir², Jum'an³

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nurulariska097@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: yasirahmad200981@gmail.com

³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: juman.sambas123@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
6-06-2025

Direvisi:
28-06-2025

Diterima:
30-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tebing Batu Village, Sebawi District, and examine it from the perspective of Islamic economic development. The research applies a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that PKH has been relatively well-implemented in terms of planning, distribution, and mentoring, and has contributed positively to improving education and health access for beneficiary families. However, the program has not fully succeeded in fostering economic self-reliance, as the assistance remains largely consumptive and lacks direction toward productive activities. From the Islamic economic perspective, PKH partially fulfills the values of maqashid syariah, especially in preserving life and lineage, but remains suboptimal in protecting wealth. Therefore, the program should be strengthened through tamkin-based empowerment and supported by Islamic economic instruments such as productive zakat and qardhul hasan, enabling PKH to function as a sustainable tool for empowering the Muslim community.

Keywords : Family Hope Program, Islamic Economic Development, Maqashid Syariah, Tamkin, Economic Self-Reliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, serta meninjaunya dari perspektif ekonomi pembangunan Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH telah berjalan dengan cukup baik dalam aspek perencanaan, penyaluran, dan pendampingan, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, program ini belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi karena bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif dan kurang diarahkan pada kegiatan produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, program ini telah memenuhi sebagian nilai maqashid syariah, terutama pada aspek perlindungan jiwa dan keturunan, tetapi belum optimal dalam perlindungan harta. Oleh karena itu, perlu penguatan melalui pendekatan tamkin dan dukungan instrumen ekonomi Islam seperti zakat produktif dan qardhul hasan, agar PKH dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Ekonomi Pembangunan Islam, *maqashid al-syariah*, Tamkin, Kemandirian Ekonomi

Corresponding Author : Ahmad Yasir, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: yasirahmad200981@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, pemerintah Indonesia meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, antara lain program berbasis perlindungan sosial seperti JAMKESMAS, RASKIN, BSM, dan Program Keluarga Harapan (PKH); program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM; serta program pemberdayaan usaha mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Lingga et al., 2019). Seluruh program tersebut didasarkan pada Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial (*Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009). Salah satu program utama dalam klaster perlindungan sosial adalah PKH, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai tahap awal pengembangan atau uji coba, dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang mengaitkan pemberian bantuan dengan pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan, serta menjadi bagian dari strategi nasional dalam menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkeadilan.

Permasalahan kajian ini terletak pada pentingnya mengkaji sejauh mana pelaksanaan program PKH tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan material, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan Islam. Meskipun PKH merupakan program perlindungan sosial yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui bantuan bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan, terdapat tantangan dalam mengukur kontribusi program ini terhadap pencapaian tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi, keadilan distribusi, dan kemandirian umat (Rahmawati, 2024). Dalam konteks tersebut, masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan bantuan yang bersifat konsumtif dengan konsep *tamkin* (pemberdayaan) dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya transformasi masyarakat miskin menjadi produktif dan mandiri. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengevaluasi implementasi PKH melalui lensa ekonomi pembangunan Islam, agar kebijakan bantuan sosial dapat diarahkan tidak hanya untuk mengurangi beban ekonomi sementara, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kajian-kajian terdahulu mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama. Pertama, dari sisi efektivitas PKH terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, penelitian Guanti et al. (2025) dan Lingga et al. (2023) menunjukkan bahwa PKH memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keluarga miskin, meskipun masih terdapat ketergantungan pada bantuan dan keterbatasan dalam pengelolaan dana secara produktif (Guanti et al., 2025; Lingga et al., 2019). Kedua, dari aspek implementasi kebijakan dan pelaksanaan teknis, studi oleh Khasanah et al. (2023) dan Utomo et al. (2014) menemukan bahwa keberhasilan implementasi PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, validitas data penerima, dan partisipasi aktif KPM, namun masih ditemukan tantangan dalam pemenuhan komponen kesejahteraan sosial, khususnya untuk kelompok lansia dan disabilitas (Khasanah & Purwanti, 2023; Utomo, 2014). Ketiga, dari perspektif ekonomi Islam dan *maqashid syariah*, artikel Sariman et al. (2022) serta Yulianti (2020) menyoroti bahwa meskipun PKH telah memenuhi sebagian dimensi *maqashid* seperti perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*), namun aspek pemberdayaan ekonomi (*tamkin*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) masih belum optimal karena bantuan bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada peningkatan kemandirian secara berkelanjutan (Sariman et al., 2022; Yulianti, 2020).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, serta mengevaluasi sejauh mana program

tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan Islam, khususnya nilai-nilai *maqashid syariah*. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan PKH dalam aspek perencanaan, penyaluran, dan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)? dan (2) Sejauh mana program PKH memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dalam perspektif ekonomi Islam? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori tentang integrasi kebijakan sosial dengan ekonomi Islam serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang program bantuan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta dampak yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sumber data utama berasal dari informan kunci, yaitu pendamping PKH, aparat desa, dan penerima manfaat PKH. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari dokumen resmi seperti DTKS, data validasi, dan laporan kegiatan kelompok KPM.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Bado, 2022; Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyaring, merangkum, serta memfokuskan informasi penting yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu dengan menelaah kembali seluruh temuan secara reflektif untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi, sehingga dapat disusun kesimpulan yang akurat mengenai efektivitas pelaksanaan PKH serta faktor pendukung dan penghambatnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, diawali dari tahap perencanaan untuk menentukan lokasi serta jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penetapan ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh operator SIKS-NG. Calon KPM harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tergolong miskin atau kurang mampu, terdaftar dalam DTKS desa, serta memiliki komponen sesuai syarat PKH, seperti pendidikan (memiliki anak usia SD, SMP, SMA), kesehatan (ibu hamil, balita), dan kesejahteraan sosial (lansia atau penyandang disabilitas berat). Tahap berikutnya adalah pertemuan awal yang bertujuan untuk memvalidasi data dengan mencocokkan kondisi nyata calon penerima dengan informasi yang tercatat, guna memastikan keakuratan dan kesesuaian data dengan kriteria program.

Setelah proses sosialisasi yang ditujukan kepada calon penerima terdaftar berdasarkan data *by name by address* dari Kementerian Sosial, dilakukan validasi menyeluruh terhadap calon KPM. Hasil validasi ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi dan dikirim ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan secara resmi sebagai peserta PKH. Penetapan dilakukan

oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga setelah peserta memenuhi semua tahapan, mulai dari pertemuan awal, validasi data, hingga pemutakhiran melalui aplikasi. Dalam rangkaian implementasi ini, terdapat pula kewajiban dari masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti pertemuan kelompok KPM. Pertemuan kelompok ini merupakan bagian dari aturan yang harus diikuti oleh seluruh KPM sebagai bentuk tanggung jawab sosial, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan secara berkala oleh pendamping PKH guna membina, mengawasi, dan memberikan edukasi lanjutan kepada para penerima bantuan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rata-rata KPM PKH di Desa Tebing Batu memiliki pendapatan di bawah Rp1.000.000 per bulan. Program PKH berperan penting dalam meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam mendukung pendidikan anak. Bantuan dana yang diberikan umumnya dimanfaatkan untuk keperluan sekolah seperti pembelian pakaian seragam, buku tulis, dan Lembar Kerja Siswa (LKS), sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar anak-anak. Selain mengandalkan bantuan, beberapa KPM juga menjalani pekerjaan sampingan seperti berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana disampaikan oleh penerima bantuan PKH, Ibu Munzana dan Ibu Narsih. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong penerima untuk tetap berdaya secara ekonomi dan sosial.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, khususnya pada aspek pertemuan kelompok, telah terlaksana dengan cukup baik. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, ketersediaan fasilitas yang memadai, aktivitas pendampingan yang aktif, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam aspek kesehatan, bantuan PKH berkontribusi pada upaya menekan angka gizi buruk pada anak. Sementara itu, di bidang pendidikan, program ini mendorong semangat anak-anak dari keluarga penerima manfaat untuk bersekolah karena kebutuhan sekolah mereka telah terjamin melalui dukungan dana PKH.

Namun demikian, tidak semua aspek program terlaksana secara optimal. Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah kurangnya program yang relevan dengan komponen kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia). Pendamping PKH belum sepenuhnya menyesuaikan program dengan karakteristik peserta, seperti usia dan kebutuhan spesifik penerima manfaat. Seharusnya, pihak pendamping menyusun kegiatan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi lansia sebagai bagian dari komponen kesejahteraan sosial PKH.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan untuk balita sudah berjalan dengan baik. Para ibu yang memiliki anak balita secara rutin mengikuti kegiatan posyandu dan memeriksakan kesehatan anak mereka. Namun, kegiatan pada komponen kesejahteraan sosial seperti senam lansia dan kerja bakti yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap bulan masih belum terlaksana dengan optimal. Sebagian besar peserta PKH belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, yang menunjukkan perlunya peningkatan peran pendamping dalam memfasilitasi dan memotivasi keterlibatan peserta dalam berbagai kegiatan sosial yang telah direncanakan.

Uang bantuan rutin yang diterima dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti membeli bahan makanan, perlengkapan sekolah anak, serta kebutuhan dasar lainnya. Meskipun sangat membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, jumlah bantuan yang terbatas membuat dana tersebut tidak memadai untuk digunakan sebagai modal usaha produktif. Akibatnya, bantuan ini belum mampu memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi atau mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh (Pangera et al., 2025). Tanpa adanya dukungan tambahan berupa pelatihan keterampilan, akses modal usaha, atau program pemberdayaan ekonomi lainnya, penerima PKH cenderung tetap

bergantung pada bantuan tersebut dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, intervensi lanjutan yang bersifat produktif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperkuat dampak positif program PKH dalam jangka panjang.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan Islam, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan utama *maqashid syariah*. Program ini berupaya melindungi dan memperbaiki aspek penting kehidupan masyarakat seperti jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan (Sariman et al., 2022). Bantuan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberi kesempatan bagi generasi muda dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan anak, dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Namun demikian, jika ditinjau dari sudut pandang pembangunan Islam yang menekankan *tamkin* atau pemberdayaan, bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif. Berdasarkan data, dana bantuan PKH hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan belum dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Dalam ekonomi Islam, bentuk bantuan yang ideal adalah yang mampu mengangkat martabat penerima dan mendorong kemandirian ekonomi (Haridah, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara bantuan konsumtif dengan program pemberdayaan produktif, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, atau pemberian modal tanpa riba melalui dana zakat dan *qardhul hasan*.

Dari segi keadilan sosial, pelaksanaan PKH di desa ini telah dilakukan berdasarkan verifikasi melalui DTKS dan validasi lapangan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi (*al-'adl*) yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Meski demikian, terdapat kelemahan dalam pemenuhan komponen kesejahteraan sosial, khususnya untuk lansia dan penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang perlu segera dibenahi, sebab dalam ajaran Islam, seluruh kelompok rentan berhak memperoleh perlindungan dan perhatian yang sama dalam distribusi sumber daya.

Di sisi lain, terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan dari penerima PKH. Beberapa KPM diketahui menjalankan usaha sampingan seperti berkebun, yang menunjukkan adanya semangat kerja (*kasb*) dan kemandirian. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Hal ini dapat diperkuat dengan menanamkan nilai-nilai etos kerja Islami, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta pembinaan moral dan spiritual (Hasyim et al., 2024). Dengan pendekatan ini, program PKH dapat berkembang dari sekadar bantuan sosial menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi umat.

Meskipun program ini berhasil memenuhi aspek perlindungan dasar sebagaimana tercantum dalam *maqashid syariah*, keberlanjutannya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat masih perlu dipertanyakan. Bantuan bersyarat yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan memang penting, namun belum menyentuh akar persoalan struktural kemiskinan, yaitu ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif dan keterbatasan kapasitas ekonomi keluarga miskin. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, program seperti PKH seharusnya tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi harus dikembangkan menjadi sistem pemberdayaan berbasis *tamkin* yang mendorong transformasi sosial melalui peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian. Oleh karena itu, agar PKH tidak sekadar menjadi program karitatif yang bersifat jangka pendek, maka perlu dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi Islam seperti pendampingan usaha produktif, pembiayaan tanpa riba, dan integrasi dengan zakat produktif, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya terbantu, tetapi juga berdaya dan sejahtera secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, telah berjalan dengan cukup baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian manfaat di bidang pendidikan dan kesehatan. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran, aktivitas pendampingan yang aktif, dan keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan kelompok menunjukkan adanya tata kelola program yang mendukung peningkatan kesejahteraan dasar. Namun, efektivitas program ini masih terbatas dalam menciptakan dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi, karena bantuan yang diberikan bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pelaksanaan komponen kesejahteraan sosial, khususnya untuk lansia dan penyandang disabilitas, masih belum optimal dan memerlukan perbaikan program yang lebih relevan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, program ini sudah sesuai dengan nilai maqashid syariah, tetapi perlu ditingkatkan melalui pendekatan *tamkin* dan dukungan sistem ekonomi Islam seperti zakat produktif dan *qardhul hasan*. Dengan demikian, PKH memiliki potensi besar untuk berkembang dari program bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan fokus pada satu lokasi, yaitu Desa Tebing Batu, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan penelusuran terhadap dinamika jangka panjang dampak PKH, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi, belum dapat dilakukan secara mendalam. Interaksi sosial antara KPM dan lingkungan sekitar juga belum dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang menggunakan pendekatan studi komparatif antar wilayah serta melibatkan metode longitudinal untuk mengevaluasi dampak program secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara lebih objektif indikator kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1st ed.). Tahta Media Group.
- Guanti, W., Hadisah, & Firmania, R. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Implementasi Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat: Studi di Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i4.678>
- Haridah. (2024). Membangun Kemandirian Ekonomi Umat melalui Kewirausahaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.183>
- Hasyim, M., Hasanah, S. U., & Akbar, M. A. (2024). Meningkatkan Etos Kerja Berbasis Religiusitas Pekerja Pabrik di Kawasan Industri (Studi Kasus di LPKS Mynara Cikarang). *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.38153/almarhalah.v8i1.14>
- Khasanah, U., & Purwanti, E. Y. (2023). PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENGELUARAN PENDIDIKAN DAN KONSUMSI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.78-99>
- Lingga, A., Yusuf, R., & Putra, I. (2019). Efek Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kemandirian Masyarakat Miskin di Desa Lampakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), Article 1.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592.
- Rahmawati; (2024). *Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mangar Perspektif Maqashid Syariah (Pamekasan)* [Undergraduate, IAIN Madura]. [//opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D29240%26keywords%3D](http://opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D29240%26keywords%3D)
- Sariman, S., Munadi, M., & Irawan, D. (2022). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Perspektif Maqashid Syariah. *Cross-Border*, 5(1), Article 1.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. (2009). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 29–34.
- Yulianti, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), Article 2.